

Jakarta, 21 Januari 2016



PERBAIKAN KEBIJAKAN
Getting Electricity

INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD (BKPM)

DIREKTUR DEREGULASI



PERBAIKAN PERINGKAT INDONESIA EODB 2017

LATAR BELAKANG :

1. Nawa Cita menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka dalam kemudahan berusaha.
2. Survei EODB adalah merupakan indikator kemudahan berusaha bagi **Usaha Kecil Menengah (UKM)** dalam melakukan kegiatan usaha.
3. RPJMN 2015 – 2019: Penurunan prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019.
4. Posisi daya saing kemudahan berusaha **Indonesia pada posisi 109** dari 189 negara yang disurvei, tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90, Filipina posisi 103.
5. Target perbaikan posisi Indonesia menjadi peringkat 40.
6. Pengumpulan data survey kemudahan berusaha 2017 akan dilakukan *World Bank* pada bulan Februari 2016 dengan batas akhir konfirmasi bulan Juni 2016.

PERMASALAHAN/KENDALA :

1. Masih kurangnya komitmen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kemudahan berusaha.
2. Relatif lambatnya perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.



Hasil Peringkat Indonesia Pada EODB 2016

Indikator Dengan Ranking yang Naik

No	10 Indikator <i>Ease of Doing Business</i>	2015	2016	(+)
	Peringkat Total Indonesia	120	109	
1	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)	110	107	+3
2	Pembayaran Pajak (Paying taxes)	160	148	+12
3	Penyambungan Listrik (Getting electricity)	78	46	+32
4	Akses Perkreditan (Getting credit)	71	70	+1

Indikator Dengan Ranking yang Turun

No	10 Indikator <i>Ease of Doing Business</i>	2015	2016	(-)
	Peringkat Total Indonesia	120	109	
1	Memulai Usaha (Starting a business)	163	173	-10
2	Perdagangan Lintas Negara (Trading across borders)	104	105	-1
3	Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)	87	88	-1
4	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	73	77	-4

Indikator Dengan Ranking Tetap

No	10 Indikator <i>Ease of Doing Business</i>	2015	2016	
	Peringkat Total Indonesia	120	109	
1	Pendaftaran Properti (Registering Property)	131	131	
2	Penegakkan Kontrak (Enforcing Contract)	170	170	

■ Sumber : Data EODB Bank Dunia 2016



PERBANDINGAN PERINGKAT SETIAP INDIKATOR NEGARA-NEGARA ASEAN PADA EODB 2016

No.	Indikator	2016						
		Negara	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand	Brunei	Vietnam
	Peringkat Total	109	1	18	49	84	90	103
1	Memulai Usaha (Starting a business)	173	10	14	96	74	119	165
2	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)	107	1	15	39	21	12	99
3	Pendaftaran Properti (Registering property)	131	17	38	57	148	58	112
4	Penyambungan Listrik (Getting electricity)	46	6	13	11	68	18	19
5	Pembayaran Pajak (Paying taxes)	148	5	31	70	16	168	126
6	Perdagangan Lintas Negara (Trading across borders)	105	41	49	56	121	99	95
7	Akses Perkreditan (Getting credit)	70	19	28	97	79	28	109
8	Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)	88	1	4	36	134	112	155
9	Penegakan Kontrak (Enforcing contract)	170	1	44	57	131	74	140
10	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	77	27	45	49	98	123	53

Hasil Peringkat Indonesia Pada EODB 2016



No.	10 Indikator <i>Ease of Doing Business</i>	2015*)	2015	2016
	Peringkat Total Indonesia	114	120	109
1	Memulai Usaha (Starting a business)	155	163	173
2	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)	153	110	107
3	Pendaftaran Properti (Registering property)	117	131	131
4	Penyambungan Listrik (Getting electricity)	78	45	46
5	Pembayaran Pajak (Paying taxes)	160	160	148
6	Perdagangan Lintas Negara (Trading across borders)	62	104	105
7	Akses Perkreditan (Getting credit)	71	71	70
8	Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)	43	87	88
9	Penegakan Kontrak (Enforcing contract)	172	170	170
10	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	75	73	77

ASEAN	2016	2015	2015*)
Singapura	1	1	1
Malaysia	18	17	18
Vietnam	90	93	78
Indonesia	109	120	114

Hasil EODB 2016 memasukkan Indonesia kedalam 24 top reformers, dengan perbaikan di 3 indikator. Namun demikian, perbaikan di indikator yang lain masih rendah dan juga negara lain melakukan perbaikan lebih cepat.

Keterangan:

- Indikator No.1-6 mengukur kompleksitas dan biaya proses. Indikator No.7-10 mengukur kekuatan lembaga hukum
- 2015*) adalah hasil kemudahan berusaha tahun 2015 sebelum disesuaikan dengan metodologi yang baru.

Gambaran Simulasi Peringkat EODB 2017 Indonesia

TARGET : PERINGKAT 40



No.	10 Indikator <i>Ease of Doing Business</i>	2015	2016	2017
	Peringkat Total Indonesia	120	109	40
1	Memulai Usaha (Starting a business)	163	173	32
2	Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)	110	107	33
3	Pendaftaran Properti (Registering property)	131	131	71
4	Penyambungan Listrik (Getting electricity)	45	46	24
5	Pembayaran Pajak (Paying taxes)	160	148	29
6	Perdagangan Lintas Negara (Trading across borders)	104	105	81
7	Akses Perkreditan (Getting credit)	71	70	28
8	Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)	87	88	49
9	Penegakan Kontrak (Enforcing contract)	170	170	42
10	Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)	73	77	54



LANGKAH STRATEGIS MENUJU PERINGKAT 40 :

Doing Business 2016

Measuring Regulatory Quality and Efficiency

Economy Profile 2016
Indonesia

responsabilité juridique

bureau de crédit Единое окно

прозрачность 一站式服务

نافذة موحدية
transparency

balcão único

oficina de crédito

collateral registry

single window liability

сроки
征信中心

реестр залогового обеспечения

مكتب الائتمان

one stop shop

servicios en línea

services en ligne

transparência

reorganización

reorganización

transparencia

guichet unique

responsabilidade jurídica

مسؤولية

registro de garantías

1. Deregulasi kemudahan berusaha Kementerian/Lembaga serta di DKI Jakarta dan Surabaya dengan mempersingkat prosedur, waktu proses dan biaya, mengacu pada indikator peringkat 30 di negara-negara lain.
2. Sosialisasi untuk memastikan implementasi peraturan kepada publik dan media di DKI Jakarta dan Surabaya.
3. Briefing kepada aparatur, responden dan Tim IFC/World Bank agar seluruh perbaikan dan implementasi kemudahan berusaha dapat disampaikan dalam survei EODB.
4. Monitoring untuk memantau seluruh proses perbaikan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.

COMPARING BUSINESS REGULATION FOR DOMESTIC FIRMS IN 189 ECONOMIES

WORLD BANK GROUP



GETTING ELECTRICITY

DKI Jakarta, Indonesia



Ireland

No	Prosedur	DB 2016	
		Waktu (Hari Kerja)	Biaya
1	Mendapatkan pemeriksaan dan sertifikat kepatuhan untuk instalasi kabel internal	7 hari	Rp. 2.575.500
2	Mengirimkan aplikasi koneksi ke PLN dan menunggu persetujuan dan estimasi	9 hari	0
3	Menjalani pemeriksaan eksternal oleh PLN	1 hari	0
4	Mendapatkan hasil kerja eksternal dari kontraktor PLN	60 hari	0
5	Mendapatkan koneksi akhir dari PLN	3 hari	Rp. 151,980,860.29
Total 5 Prosedur Memulai Usaha di DKI Jakarta		80	

No	Prosedur	DB 2016	
		Waktu (Hari Kerja)	Biaya
1	Mengajukan permohonan kepada Listrik Dewan (ESB) Jaringan dan menunggu perkiraan	18 hari	0
2	Menjalani pemeriksaan eksternal oleh ESB Networks	1 hari	UAH 190 – 250
3	Menandatangani perjanjian koneksi dan menunggu penyelesaian karya eksternal dengan ESB Networks	60 hari	EUR 16.699,5
4	Menyerahkan sertifikat penyelesaian listrik listrik untuk badan pengawas	1 hari	0
5	Mendaftar dengan pemasok listrik dan mendapatkan instalasi meter dan koneksi akhir dari ESB Networks	7 hari	EUR 7.600
Total 5 Prosedur Memulai Usaha di Ireland		87	



GETTING ELECTRICITY

Indeks Keandalan Pasokan dan Transparansi Tarif

Index	DKI Jakarta, Indonesia		Dublin, Irlandia	
	Jawaban	Nilai	Jawaban	Nilai
Indeks keandalan pasokan dan transparansi tarif (0-8)		7		8
Total durasi dan frekuensi pemadaman per pelanggan dalam setahun (0-3)		2		3
Indeks rata – rata lamanya gangguan sistem (SAIDI)	3.9		0.3	
Indeks rata – rata frekuensi gangguan sistem (SAIFI)	2.5		0.2	
Mekanisme untuk monitoring pemadaman		1		1
Apakah penggunaan peralatan distribusi dapat memantau pemadaman secara otomatis?	Ya		Ya	
Mekanisme untuk memperbaiki layanan (0-1)		1		1
Apakah penggunaan peralatan distribusi otomatis dapat memperbaiki layanan?	Ya		Ya	
Pemantauan regulasi (0-1)		1		1
Apakah regulator (suatu entitas terpisah dari utilitas) memantau kinerja utilitas pada keandalan pasokan?	Ya		Ya	
Alat pencegah keuangan yang bertujuan untuk membatasi pemadaman (0-1)		1		1
Apakah utilitas membayar kompensasi kepada pelanggan atau membayar denda oleh regulator (atau keduanya) jika pemadaman melebihi batas tertentu?	Ya		Ya	
Komunikasi tarif dan perubahan tarif (0-1)		1		1
Apakah tarif yang tersedia secara online itu efektif?	Ya		Ya	
Link ke website, jika tersedia secara online		http://www.pln.co.id/dataweb/ttl2014/permen_esdm_ttl_2014.pdf		http://www.esb.ie/esbnetworks/en/download_documents/chargespolicies/index.jsp
Apakah pelanggan diberitahu tentang perubahan tarif menjelang siklus penagihan?	Ya		Ya	



PERBAIKAN GETTING ELECTRICITY

Menuju Peringkat 40

Penyederhanaan Persyaratan/Prosedur	Perbaikan	Peraturan yang Harus Diterbitkan	Penanggungjawab
Percepatan waktu menuju 40 hari sesuai dengan SOP PT. PLN Persero.	Percepatan sambungan listrik untuk kegiatan usaha daya 147 KWH.	Penerbitan Peraturan Direktur Utama PLN Sambungan Listrik Untuk Daya sampai dengan 200 KWH paling lama 40 hari.	PT. PLN Menteri ESDM



PREDIKSI GETTING ELECTRICITY 2017

INDONESIA

Indikator	2017	2016
Peringkat	24	46
Prosedur (jumlah)	5.0	5.0
Waktu (hari)	40.0	79.0
Biaya (% dari pendapatan per kapita)	383.0	383.0
Keandalan pasokan dan transparansi indeks tarif (0-8)	7.0	7.0

OBTAINING AN ELECTRICITY CONNECTION*

Name of utility in Jakarta and Surabaya	PT PLN
Price of electricity (US cents per kWh) i Jakarta and Surabaya	14
City	Jakarta dan Surabaya

IRLANDIA

Indikator	2016	2015
Peringkat	30	29
Prosedur (jumlah)	5.0	5.0
Waktu (hari)	85.0	85.0
Biaya (% dari pendapatan per kapita)	70.8	83.3
Keandalan pasokan dan transparansi indeks tarif (0-8)	8.0	8.0

OBTAINING AN ELECTRICITY CONNECTION*

Name of utility	Electricity Supply Board (ESB)
Price of electricity (US cents per kWh)	23
City	Dublin



Thank You

Terima Kasih



**Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)**

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 5292 1334

f . +62 21 5264 211

e . info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

